



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : YULI ASTANTO WAHANANING HENDRA
- Jabatan** : PANITERA PENGGANTI
- NHK** : 753519

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.350.000.000
1. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.760.000.000		
2. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 280.000.000		
3. Tanah Seluas 442 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 310.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	181.500.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000		
2. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.551.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.551.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YULI ASTANTO WAHANANING HENDRA

NIK : 3404071907810016

Lembaga : MAHKAMAH AGUNG

Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jabatan : PANITERA PENGGANTI

Jenis Laporan : Periodik - 2024

Tanggal Kirim : 14 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.